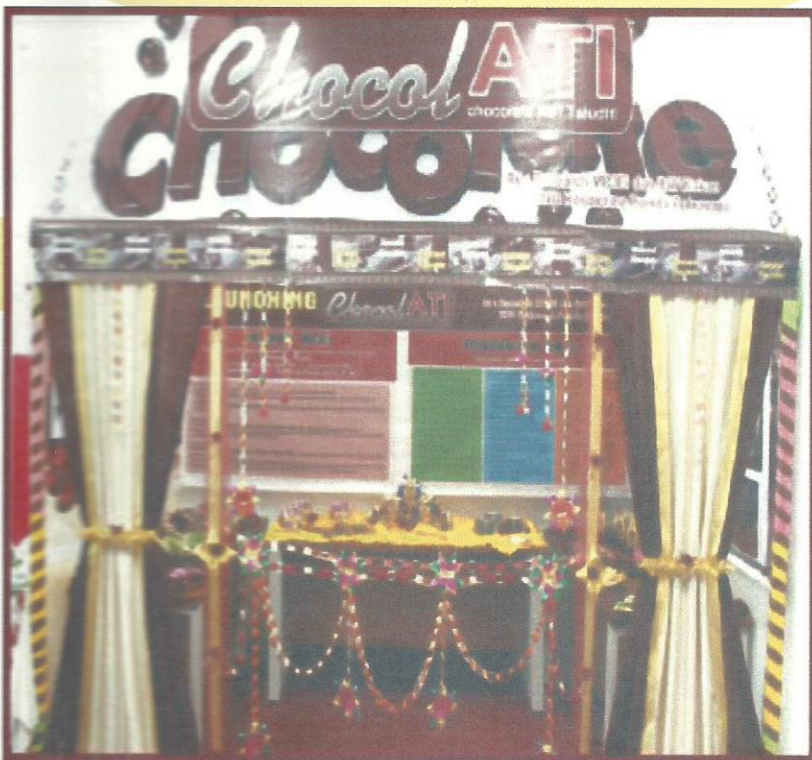




PROSIDING SEMINAR NASIONAL

*Akselerasi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan
Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*



Gorontalo, 7 Mei 2015

**Ball Room Training Centre
Universitas Negeri Gorontalo**

ISBN : 978-979-1340-85-4



UNG Press - Gorontalo
Jl. Jend. Sudirman No. 6 Telp. (0435) 821125
Fax. (0435) 821752 Kota Gorontalo
Website: www.ung.ac.id



**PUSAT STUDI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL
“Akselerasi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan
Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN”

ISBN : 978-979-1340-85-4

PUSAT STUDI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Kerjasama dengan:

Universitas Negeri Gorontalo Press
(Anggota IKAPI)
Jl. Jend. Sudirman No.6 Telp. (0435) 821125
Kota Gorontalo
Website : www.ung.ac.id

PUSAT STUDI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Kerjasama dengan:

Universitas Negeri Gorontalo Press
(Anggota IKAPI)
Jl. Jend. Sudirman No.6 Telp. (0435) 821125
Kota Gorontalo
Website : www.ung.ac.id

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

PROSIDING

**“Akselerasi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan
Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN”**

ISBN : 978-979-1340-85-4

Penyunting :

- Dr. Irawaty Igrisa, S.Pd.M.AP
- Rustam Yusuf, S.Pd. M.Si.

Perancang Sampul :
Aspopik, S.Kom.

Dicetak oleh:

UNG Press

Cetakan Pertama : September 2015

PENERBIT UNG Press Gorontalo
Anggota IKAPI

Isi diluar tanggungjawab percetakan

© 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini **tanpa izin**
tertulis dari penerbit

DAFTAR ISI

	Halaman
1. Memasyarakatkan Hasil Riset untuk Memacu Pembangunan <i>Edi Martono (UGM)</i>	1
2. Respon Metabolik Kambing Kacang Jantan terhadap Perubahan Status Asupan Pakan <i>Irkham Widiyono, dkk (UGM)</i>	5
3. Kesetaraan Gender Budaya Bugis Makassar (Studi Kasus pada Lima Keluarga) <i>Hj. Musdalia Mustadjar (UNM)</i>	13
4. Keunggulan Jagung Sebagai Komoditas Ekonomi Rakyat Provinsi Gorontalo <i>Mahludin Baruadi, dkk</i>	25
5. Penguatan Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Provinsi Gorontalo <i>Iqbal Bahuwa,</i>	31
6. Peningkatan Hasil Produksi Kakao Melalui Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Pohuwato <i>Irawaty Igirisa, Ramlan Amir Isa, dkk</i>	41
7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Kakao di Kabupaten Pohuwato <i>Faiz Mahmud</i>	53
8. Implementasi IPTEKS bagi Produk Eksport Sulaman Karawo di Kabupaten Gorontalo <i>Irawaty Igirisa, dan Ramlan Amir Isa</i>	59
9. Revitalisasi Perekonomian Berbasis Syariah di Gorontalo <i>Niswatin, Nilawaty Yusuf, dan Mahdalena</i>	63
10. Pengaruh Perilaku Wirausaha terhadap Partisipasi Anggota dan Implikasinya terhadap Kinerja Koperasi di Provinsi Gorontalo <i>Abd. Rahman Pakaya,</i>	79
11. Analisis Tingkat Kesehatan Bank pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk <i>Siti Pratiwi Husain, dan Sahmin Noholo,</i>	85
12. Gaya Kepemimpinan Transformasional, Budaya Organisasi dan Pengaruhnya terhadap Prestasi Organisasi <i>Rustam Yusuf,</i>	93
13. Penerapan IPTEKS Bagi Komoditas Kakao Diwilayah Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato <i>Purnama Ningsih Maspeke, dan Irawaty Igirisa,</i>	101

14. Strategi Transformasi Organisasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di PT PLN Area Gorontalo <i>Yanti Aneta,</i>	107
15. Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Provinsi Gorontalo <i>Juriko Abdussamad.....</i>	115
16. Peran <i>Good Corporate Governance</i> dalam <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> Pada Perusahaan BUMN yang Listing Di Bursa Efek Indonesia <i>Amir Lukum,</i>	121
17. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif Terhadap Pengambilan Keputusan di Desa Longalo Kecamatan Bulango Kabupaten Bone Bolango <i>Robiyati Podungge</i>	127
18. Pajak Daerah Kendaraan Bermotor Provinsi Gorontalo (Problematika Dalam Lalu Lintas Jalan Raya) <i>Rustam Tohopi.....</i>	133
19. Budidaya Dan Analisis Ekonomi Usaha Lebah Madu Jenis Apis Cerana Kelompok Tani Desa Tupa <i>Idris Yanto Niode, dkk.....</i>	141
20. Analisis Potensi Ekonomi Dan Pemanfaatan Lahan Area Penggunaan Lain dan Hak Guna Usaha Dalam Pengembangan Investasi Di Provinsi Gorontalo <i>Fachrudin Zain Olilingo</i>	147
21. Identifikasi Penentuan Harga Jual Jasa pada Tempat Penitipan Anak Laboratorium Kiddie Care's Universitas Negeri Gorontalo <i>Hartati Tuli</i>	161

PENGUATAN KINERJA PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN DALAM Mendukung KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI GORONTALO (Studi kasus di Kota Gorontalo)

Oleh :

Mohamad Ikbah Bahua

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja penyuluh pertanian tanaman pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo serta merumuskan model dan biaya transaksi (*transaction cost*) yang diperlukan untuk merevitalisasi kegiatan PPL di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan responden. Sebanyak 30 petani, 10 orang penyuluh dan 5 orang *key person* diambil sebagai sampel dengan *multistages sampling*. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan kinerja penyuluh. *Transaction Cost* digunakan untuk mengestimasi besaran biaya transaksi yang diperlukan untuk melaksanakan revitalisasi kegiatan penyuluh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja penyuluh pertanian di Kota Gorontalo tergolong sedang atau sudah agak baik dikarenakan penyuluh terbiasa memberikan penyuluhan pertanian untuk komoditas padi pada saat orde baru. Jumlah penyuluh di daerah penelitian belum sesuai dengan anjuran jumlah penyuluh ideal yaitu *one village one extension*. Biaya dalam melaksanakan kegiatan penyuluh pertanian model kelembagaan sentralisasi secara umum lebih rendah dibandingkan pada model kelembagaan desentralisasi. Sebaliknya aktivitas monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan membutuhkan biaya lebih tinggi.

Kata kunci: Kinerja Penyuluh Pertanian, Biaya Transaksi, Provinsi Gorontalo, Indonesia.

PENDAHULUAN

Jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai lebih dari 230 juta jiwa. Peningkatan jumlah penduduk tersebut menimbulkan tantangan yang kompleks dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan.

Usaha untuk memenuhi kebutuhan pangan yang dilakukan pemerintah, antara lain melalui penetapan sasaran pembangunan pertanian yang diarahkan pada peningkatan produksi pangan pokok terutama padi (beras), perbaikan sistem distribusi dan akses pangan serta peningkatan konsumsi, diversifikasi dan keamanan pangan dalam rangka

mewujudkan ketahanan pangan nasional (Deptan, 2007). Dua komponen utama dalam perwujudan ketahanan pangan tersebut adalah dengan peningkatan kebutuhan pangan dan kesempatan kerja bagi penduduk untuk memperoleh pendapatan yang layak dan akses terhadap pangan (Suryana, 2001; 2002). Ketahanan pangan diartikan sebagai tersedianya pangan dalam jumlah dan mutu yang cukup, dapat terdistribusi dengan harga yang terjangkau, dan aman dikonsumsi masyarakat untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari sepanjang waktu. Ketahanan pangan tidak hanya cukup sampai pada tingkat global, nasional, maupun

regional, akan tetapi harus sampai ke tingkat rumah tangga dan individu (Rachman, Ariani dan Purwantini, 2007).

Pemerintah telah berkomitmen untuk dapat meningkatkan ketahanan pangan melalui berbagai kebijakan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pangan. Bahkan pemerintah telah menetapkan kebijakan swasembada pangan untuk 5 (lima) komoditas penting yaitu beras, jagung, kedelai, daging sapi dan gula. Pada tahun 2004 Indonesia telah berswasembada beras dan terus diupayakan keberlanjutannya sementara target swasembada jagung pada tahun 2007, gula tahun 2009, daging sapi tahun 2010 dan kedelai tahun 2015 (Dewan Ketahanan Pangan dan FAO, 2005).

Pembangunan sistem ketahanan pangan pada hakekatnya merupakan pembangunan yang menitik-beratkan pada harmonisasi dari beberapa sub-sistem yang meliputi sub sistem sarana sumberdaya, ketersediaan pangan, distribusi, konsumsi pangan, kewaspadaan dan penganekaragaman pangan, serta sub-sistem agribisnis pangan (Susilowati et al., 2005; 2006). Pembangunan sub-sistem sarana sumberdaya mencakup perencanaan dan pengaturan pembinaan teknologi, sarana produksi dan permodalan serta pengembangan dalam kelembagaan tani.

Pembangunan dalam sub-sistem ketersediaan pangan mencakup penyelenggaraan produksi cadangan pangan serta menanggulangi gejolak harga pangan. Pembangunan sub-sistem distribusi mencakup penyiapan bahan, koordinasi, pemantauan, pengendalian, distribusi pangan serta mengembangkan sarana prasarana distribusi, memantau dan mengevaluasi pengadaan dan cadangan pangan.

Pembangunan sub-sistem konsumsi pangan, kewaspadaan dan penganekaragaman pangan mencakup perumusan kriteria rawan pangan, keamanan, mutu pangan dan mengembangkan pola konsumsi masyarakat serta mengembangkan jaringan informasi pangan (Susilowati et al., 2004; 2005). Pembangunan sub-sistem agribisnis pangan dapat mencakup perumusan bahan, koordinasi, pembinaan dan pengembangan program agribisnis pangan, mengembangkan mutu hasil, memperluas peluang pasar, meningkatkan hasil serta mengembangkan jaringan usaha dan kemitraan. Masalah utamanya adalah berdasarkan hasil riset Susilowati et al. (2004, 2005) menunjukkan bahwa ketahanan pangan hewani dari sumber ikan untuk daerah Provinsi Gorontalo juga masih belum dapat dikatakan aman (*not completely secured*). Salah satu penyebab kerawanan pangan adalah adanya fluktuasi produksi. Hal ini diduga karena kurangnya kegiatan penyuluhan yang menurun sangat drastis pada sektor pertanian sejak satu dekade lalu. Dengan demikian maka ketahanan pangan menjadi isu penting yang harus ditangani dan dicarikan solusi pemecahannya. Ini penting mengingat pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus tersedia secara berkesinambungan, terdistribusi secara merata, terjangkau masyarakat dengan mutu yang baik dan sekaligus produk pangan dengan nilai tambah yang dapat meningkatkan pendapatan petani produsen pangan.

Peranan penyuluh pertanian sebagai fasilitator, motivator dan pendukung gerak usaha petani merupakan titik sentral dalam memberikan penyuluhan kepada petani akan berusaha tani dengan memperhatikan kelestarian dari sumberdaya alam. Kesalahan dalam memberikan penyuluhan kepada

petani nantinya akan menimbulkan dampak negatif yang dapat membahayakan lingkungan. Pada prinsipnya proses penyelenggaraan penyuluhan pertanian dapat berjalan dengan baik dan benar apabila didukung dengan tenaga penyuluh yang profesional, kelembagaan penyuluhan yang handal, materi penyuluhan yang berkelanjutan, sistem penyelenggaraan penyuluhan yang benar serta metode penyuluhan yang tepat dan manajemen penyuluhan yang sinergi.

Tugas seorang Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) adalah meniadakan hambatan yang dihadapi seorang petani dengan cara menyediakan informasi dan memberikan pandangan mengenai masalah yang dihadapi. Informasi tentang pengelolaan sumber daya alam dengan teknologi yang baik dan benar sesuai dengan kondisi lahan sangat bermanfaat bagi petani untuk meningkatkan hasil produksinya tanpa harus merusak lingkungan usahataniannya sehingga dapat meminimalisir degradasi lahan dan kerusakan lingkungan pada umumnya. Dengan begitu maka strategi penyuluhan pertanian ke depan, dalam rangka mendukung revitalisasi pertanian, dapat ditekankan, diintensifkan dan difokuskan pada kualitas komoditas unggulan daerah, baik pada penerapan teknologi produksi, teknologi pasca panen, efisiensi biaya produksi dan pemasaran.

Biaya transaksi dari suatu pertukaran merupakan karakteristik yang melekat pada suatu kelembagaan. Petani sebagai salah satu unsur di dalam kelembagaan tataniaga tidak memiliki akses dan kontrol secara penuh terhadap penentuan nilai dan biaya transaksi. Kontribusi utama kelembagaan (institusi) dalam proses pembangunan adalah mengkoor-

dinasikan para pemilik faktor produksi (sumber daya alam, tenaga kerja, kapital, manajemen dan lainnya) dalam proses transformasi dari faktor produksi (input) menjadi output. Pada saat yang bersamaan juga mengkoordinasikan distribusi output tersebut kepada faktor pemilik (input). Pemilik faktor tersebut dapat individu, organisasi, pemerintah dan lainnya. Anwar (1998) menjelaskan bahwa karena adanya informasi asimetris maka individu atau kelompok menentukan pilihan apakah suatu transaksi akan dilakukan dalam sistem pasar, atau dalam sistem organisasi non pasar atau jenis kelembagaan lainnya akan ditentukan oleh nilai dari biaya transaksi. Sehingga dari hasil analisis biaya transaksi, dapat dirumuskan perlu tidaknya penyuluh pertanian lapangan. Pertanyaan penelitian yang perlu dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja penyuluh pertanian tanaman pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo?
2. Bagaimana model dan biaya transaksi (*transaction cost*) yang diperlukan untuk merevitalisasi kegiatan PPL di Provinsi Gorontalo?

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi penelitian berada di wilayah Provinsi Gorontalo. Pemilihan daerah penelitian dilakukan dengan metode *multistage sampling*, untuk mendapatkan karakteristik tertentu dalam efisiensi produksi dan pengelolaan agribisnis di daerah yang mempunyai cluster produk dan penyuluhan tertentu. Berikut ini adalah daerah penelitian yang dianggap dapat mewakili karakteristik penghasil produk pertanian di Provinsi Gorontalo yang akan diambil sebagai *cluster* daerah penelitian, yaitu Kota Gorontalo. Kota Gorontalo merupakan daerah penghasil padi di Provinsi Gorontalo. Sampel yang akan diambil adalah sebanyak 30

petani, 10 orang penyuluh dan 5 orang *key person*. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi, Focus Group Discussion/ FGD. Untuk

mempermudah dalam penerapan model penelitian maka perlu dijelaskan secara rinci variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini seperti pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Konstruks	Dimensi Konstruk	Skala Pengukuran
Kinerja Penyuluh	Kinerja penyuluh adalah kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan (As'ad, 1991), tingkat pencapaian hasil seorang penyuluh di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.	<ul style="list-style-type: none"> - Responsivitas - Responibilitas - Kualitas Pelayanan 	Metric
Transaction cost	<i>Transaction Cost</i> (biaya ransaksi) adalah jumlah biaya yang digunakan untuk mengestimasi nilai biaya transaksi dalam membangun model Revitalisasi Penyuluhan (PPL) pada penelitian ini maka akan diadopsi dari teknik <i>transaction cost</i> dari www.worldfish.org dan www.eepsea.org .	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya informasi - Biaya set up institusional - Biaya operasional 	Metric
Sumberdaya manusia	Sumber Daya Manusia adalah merupakan salah satu fungsi penyuluhan, dimana fokus, fungsi ini adalah membangun pemberdayaan, dan potensi klien untuk perspektif kognitif (pengetahuan dan cara gaya berfikir) untuk Membuat keputusan dan menyelesaikan masalah sendiri, mengambil peranan memimpin institusi sosial ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup (Rahim M.Sail, 2008)	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Tenaga Penyuluh - Tingkat Pendidikan - Frekuensi Pelatihan - Kemampuan mengaplikasikan teknologi 	Metric
Teknologi	Teknologi merupakan penerapan dan penerapan teknologi dalam pelaksanaan penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi Teknologi - Jumlah penerapan teknologi - Pengembangan ICT 	Metric
Tugas Penyuluh	Penugasan yang diberikan kepada penyuluh lapangan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Kunjungan lapangan - Kelompok 	Metric
Efisiensi Produksi	Nilai efisiensi yang telah dicapai oleh petani dalam menggunakan input	<ul style="list-style-type: none"> - Skor efisiensi 	Metric
Karakteristik petani	Merupakan karakteristik petani di daerah penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah keluarga - Usia - Penghasilan 	Metric

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis seperti yang dilakukan oleh Susilowati dan Suprihono (2004); Susilowati et al. (2004, 2005); Waridin dan Larsito (2007); Waridin dan Redjeki (2007); Waridin (2007) dengan modifikasi seperlunya. Teknik analisis yang akan digunakan dalam kajian ini adalah statistik deskriptif. Untuk dapat mengestimasi biaya transaksi akan digunakan teknik analisis *transaction cost* dari Worldfish (www.worldfish.org) dan/

atau dari *Economy and Environment Program of South East Asia (EEPSEA)* (lihat:www.eepsea.org).

Estimasi biaya transaksi untuk membandingkan kedua model kelembagaan penyuluhan dilakukan dengan menghitung waktu yang dicurahkan penyuluh dalam melakukan kegiatan penyuluhan pertanian dan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai kegiatan penyuluhan pertanian yang dipublikasikan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara

(APBN) dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana yang dilakukan oleh Jahan, *et al.* (1998).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan di Kota Gorontalo dilakukan secara bersama-sama antara penyuluh pertanian PNS, Tenaga Kerja Pertanian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluhan Pertanian (THL-TB PP), penyuluh pertanian swasta dan penyuluh pertanian swadaya. Untuk memperlancar pelaksanaan penyuluhan, Departemen Pertanian (Deptan) menargetkan adanya satu orang penyuluh di setiap desa. Namun, sampai saat ini masih sulit untuk memenuhi target tersebut mengingat beberapa kendala yang ada.

Kinerja penyuluh pertanian di Kota Gorontalo berdasarkan persepsi responden secara umum adalah sedang. Pada faktor pemberdayaan sumberdaya manusia, penyuluh pertanian memiliki kinerja yang baik pada pelibatan petani dalam menyusun rencana kerja. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluh pertanian di Kota Gorontalo sering melakukan diskusi dengan petani dalam menentukan kegiatan apa yang diperlukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam menumbuhkan kemitraan antara petani dan pelaku usaha menunjukkan kinerja penyuluh pertanian adalah sedang yang berarti ada kerja-usaha yang dilakukan oleh penyuluh pertanian di Kota Gorontalo dalam menjalin kerjasama antara petani dan pelaku usaha. Hal tersebut terlihat khususnya dalam tumbuh-kembangkan kemitraan pemasyarakatan. Penyuluh berupaya mempertemukan petani sebagai produsen dengan konsumen khususnya konsumen korporat (perusahaan).

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan petani, penyuluh pertanian juga

berusaha menciptakan suasana yang kondusif dalam menumbuhkan kewirausahaan. Dari sisi kreatifitas dan inisiatif kinerja penyuluh di Kota Gorontalo tergolong sedang menurut persepsi responden. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluh selalu berusaha memahami permasalahan petani dan menyelesaikan dengan memberikan beberapa alternatif penyelesaian masalah.

Untuk faktor alih teknologi, kinerja penyuluh pertanian di Kota Gorontalo sebagian besar adalah sedang. Penyediaan dan penyebaran informasi teknologi yang dilakukan oleh penyuluh pertanian sudah cukup merata tetapi belum optimal yang diakibatkan masih kurangnya tenaga penyuluh pertanian di lapangan. Berdasarkan persepsi responden pengetahuan dan keterampilan teknologi penyuluh pertanian di Kota Gorontalo cukup baik namun masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan. Selain itu perlunya penyuluh pertanian mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi dan selalu melakukan *updating*, sehingga informasi dapat dengan mudah disampaikan dan *up to date* walaupun penyuluh pertanian tidak berada di tempat petani.

Penyuluh pertanian di Kota Gorontalo juga memiliki keterampilan metode penyuluhan yang cukup baik terlihat dari persepsi responden yang menyatakan kinerjanya sedang. Metode penyuluhan yang dilakukan penyuluh pertanian antara lain pertemuan rutin, demplot dan kunjungan lapangan telah dilakukan dengan baik di Kota Gorontalo. Berkaitan dengan pola suluh di Indonesia penyuluh pertanian di Kota Gorontalo memiliki kinerja sedang.

Model dan Biaya Transaksi Untuk Revitalisasi kegiatan PPL

Biaya transaksi penyuluhan adalah biaya yang dibutuhkan untuk

perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan. Untuk mengevaluasi potensi setiap model kelembagaan penyuluhan biaya transaksi penyuluhan dilakukan perbandingan antara biaya transaksi penyuluhan kelembagaan sentralisasi (periode tahun 1995 - 1998) dengan kelembagaan desentralisasi (periode tahun 2006 - 2009). Biaya transaksi penyuluhan meliputi biaya informasi, biaya penetapan keputusan dan biaya operasional.

Estimasi biaya transaksi untuk membandingkan kedua model kelembagaan penyuluhan dilakukan dengan menghitung waktu yang dicurahkan penyuluh dalam melakukan kegiatan penyuluhan pertanian dan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai kegiatan penyuluhan pertanian yang dipublikasikan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD).

Estimasi Biaya Transaksi Kegiatan Penyuluhan Pertanian Berdasarkan Curahan Waktu Penyuluh

Tabel 2. Biaya Informasi Penyuluhan pada Model Sentralisasi dan Desentralisasi

Aktivitas Pengumpulan informasi	Sentralisasi (Jam/Bulan)	Desentralisasi (jam/bulan)
a. Informasi produksi (jumlah, kualitas, lokasi)	5.22	4.44
Informasi pasar (harga, jumlah, lokasi)	7.89	6.33
b. Informasi teknologi baru	3.56	11.67
c. informasi mitra petani	0.22	4.56
Jumlah	16.8	27.00

Sumber : Data Primer (2014), diolah

Berdasarkan data pada Tabel 3 diketahui bahwa waktu yang dicurahkan penyuluh untuk mengumpulkan informasi produksi dan informasi pasar pada model kelembagaan sentralisasi lebih tinggi

Biaya transaksi kegiatan penyuluhan pada kedua model kelembagaan dihitungkan berdasarkan waktu yang dicurahkan penyuluh, yang meliputi waktu yang dicurahkan penyuluh untuk mengumpulkan informasi (biaya informasi), waktu yang dicurahkan penyuluh dalam pembuatan kesepakatan antara *stakeholders* penyuluhan (biaya pembuatan keputusan) dan waktu yang dicurahkan penyuluh untuk melaksanakan dan memonitor program penyuluhan (biaya operasional).

Biaya informasi adalah biaya pengumpulan informasi yang diperlukan dalam mengelola suatu sistem agar dihasilkan keputusan yang efisien (Abdullah, et al. 1998). Keberhasilan program penyuluhan sangat bergantung pada jumlah dan jenis informasi yang tersedia bagi para pengambil kebijakan, penyuluh dan sasaran penyuluhan. Waktu yang dicurahkan penyuluh untuk mengumpulkan informasi pada model kelembagaan penyuluh sentralisasi (1995-1998) dan desentralisasi (2006 -2009) sebagaimana tersaji pada Tabel 2.

dibandingkan pada era desentralisasi. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi telepon genggam yang sudah merambah sampai ke pelosok desa. Tahun 1995 - 1998 akses informasi dari petani sebagai produsen

komoditas pertanian kepada penyuluh masih terbatas. Perkembangan informasi produksi baik yang berkaitan dengan kuantitas, kualitas maupun lokasi diperoleh penyuluh dengan mendatangi kelompok tani. Adapun tahun 2006 - 2009, teknologi telepon genggam sudah bukan menjadi hal asing lagi bagi petani sehingga penyuluh dapat mengakses perkembangan informasi produksi melalui telepon.

Biaya pembuatan keputusan adalah biaya yang ditimbulkan dalam pembuatan

kesepakatan antara *stakeholders* penyuluhan. Biaya tersebut meliputi biaya pembuatan kesepakatan tentang program penyuluhan yang akan dilaksanakan, biaya partisipasi dalam pertemuan, biaya komunikasi keputusan pada kelompok, dan biaya koordinasi antara pemerintah lokal dan pusat. Waktu yang dicurahkan penyuluh untuk pembuatan keputusan pada model kelembagaan penyuluh sentralisasi (1995-1998) dan desentralisasi (2006 - 2009) sebagaimana tersaji pada Tabel 3.

Tabel 3. Biaya Pembuatan Keputusan pada Model Sentralisasi dan Desentralisasi (Jam/Bulan)

Aktivitas Pembuatan Keputusan	Sentralisasi (Jam/Bulan)	Desentralisasi (jam/bulan)
a. Penyusunan program penyuluhan	2.22	5.78
b. Partisipasi dalam pertemuan kelompok	10.67	14.33
c. Komunikasi keputusan pada anggota kelompok	2.89	25.33
d. Kordinasi pusat & local	9.33	2.22
Jumlah	25.11	47.67

Sumber : Data Primer (2014), diolah

Biaya operasional adalah biaya yang digunakan untuk melaksanakan dan memonitor kegiatan-kegiatan penyuluhan. Biaya operasional penyuluhan meliputi biaya pelaksanaan kegiatan penyuluhan (pembuatan alat peraga, demplot, demfarm, dsb), biaya evaluasi dan monitoring

kegiatan penyuluhan serta biaya operasional kelembagaan. Waktu yang dicurahkan penyuluh untuk operasional kolektif pada model kelembagaan penyuluh sentralisasi (1995 - 1998) dan desentralisasi (2006 - 2009) sebagaimana tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4. Biaya Operasional Kolektif pada Model Sentralisasi dan Desentralisasi (Jam/Bulan)

Aktivitas Pembuatan Keputusan	Sentralisasi (Jam/Bulan)	Desentralisasi (jam/bulan)
a. Pelaksanaan Kegiatan	42.22	38.33
b. Evaluasi & monitoring	23.89	20.56
c. Operasional Kelembagaan	9.78	15.11
Jumlah	75.89	74.00

Sumber : Data Primer (2014), diolah

Curahan waktu penyuluh yang lebih tinggi pada model kelembagaan desentralisasi diduga disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Model kelembagaan desentralisasi menuntut keahlian penyuluh yang

bersifat polivalen. rtinya penyuluh harus menguasai beberapa bidang penyuluhan yang meliputi bidang tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, kehutanan dan peternakan. Tuntutan keahlian yang bersifat polivalen au tidak mau

- 'memaksa' penyuluh untuk mencurahkan waktu lebih banyak dalam menyiapkan kegiatan penyuluhan.
2. Untuk meningkatkan motivasi kerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan dan memobilisasi penyuluh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang pada periode sebelumnya mulai menurun pada tahun 2008, pemerintah memberikan

biaya operasional penyuluh (BOP) senilai Rp. 250.000/orang/bulan.

Estimasi Biaya Transaksi Kegiatan Penyuluhan Pertanian Berdasarkan Biaya yang Dikeluarkan Pemerintah

Biaya transaksi kegiatan penyuluhan yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai kegiatan penyuluhan seperti pada Tabel 5.

Tabel 5. Biaya Transaksi Kegiatan Penyuluhan Pertanian di Provinsi Gorontalo Berdasarkan Biaya yang Dikeluarkan Pemerintah

Aktivitas Pengumpulan Informasi Pembuatan Keputusan	APBN 755,712,000	APBD I 10.000.000
a. Pembuatan keputusan tentang program penyuluhan	358,262,000	425.000.000
b. Koordinasi pusat & local	252,000,000	400.000.000
Operasional kolektif		
a. pelaksanaan kegiatan penyuluhan	314,961,000	2.860.000.000
b. Evaluasi dan monitoring	496,043,000	150.000.000
c. Operasional kelembagaan		
c1. BOP	7,872,000,000	
c2. honor	188,800,000	
c3. administrasi	199,045,000	183.020.000
c4. peningkatan sarana prasarana	180,000,000	806.445.000
d. pendidikan dan latihan	419,730,000	20.000.000
Jumlah	11.036.553.000	4.854.465.000

Sumber : Sekretariat Bakorluh Provinsi Gorontalo (2014)

Sumber pembiayaan kegiatan penyuluhan berasal dari dana APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Dana APBN disalurkan melalui dana dekonsentrasi sebagai insentif bagi percepatan implementasi UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Selain pembiayaan dana dekonsentrasi penyuluhan pertanian yang bersumber dari APBN Departemen Pertanian c.q. Badan Pengembangan SDM Pertanian serta pembiayaan untuk P3TIP/FEATI (pinjaman Bank Dunia, APBN, APBD), sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 ini tersedia pula dana APBN dalam rangka membantu kabupaten/kota membiayai

kebutuhan fisik sarana dan prasarana penyuluhan pertanian dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian. Alokasi penggunaan DAK secara lebih rinci mengacu kepada Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal, Departemen Pertanian.

Model Biaya Transaksi untuk Merevitalisasi Kegiatan Penyuluhan Pertanian

Model biaya transaksi untuk merevitalisasi kegiatan penyuluhan pertanian disusun berdasarkan skenario bahwa keseluruhan kelembagaan penyuluhan di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota telah dibentuk berdasarkan amanat UU No.

Tahun 2006. Selain itu kebutuhan jumlah penyuluh dihitung berdasarkan rumusan target jumlah penyuluh yang ditetapkan

Deptan melalui konsep *one village one extension*.

Tabel 6. Model Biaya Transaksi untuk Merevitalisasi Kegiatan Penyuluhan Pertanian

Eksisting Model Biaya Transaksi	Revitalisasi Kegiatan Penyuluhan Pertanian	Model Biaya Transaksi untuk Merevitalisasi Penyuluhan Pertanian
<p>a. Kondisi kelembagaan :</p> <p>1 perda propinsii</p> <p>6 perda kabupaten</p> <ul style="list-style-type: none"> • 19 perbup/walikota • 8 draft/rekomendasi <p>2 non kelembagaan</p> <p>b. Jumlah penyuluh : 2624</p>	<p>a. Kelembagaan sesuai amanat UU No.16 Tahun 2006</p> <p>b. Target jumlah penyuluh dengan konsep one village one extension</p> <p>c. Penyediaan informasi yang up to date</p> <p>d. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan</p>	<p>a. Kondisi kelembagaan :</p> <p>1 perda propinsii</p> <ul style="list-style-type: none"> • 35 perda kabupaten <p>b. Jumlah penyuluh : 8573 org</p> <p>c. Informasi up to date</p> <p>d. Terlaksananya kegiatan penyuluhan</p>

KESIMPULAN

Dari hasil telaah kinerja penyuluhan disimpulkan bahwa persepsi responden terhadap kinerja penyuluh pertanian di Kota Gorontalo (padi) tergolong sedang. Hal ini dapat dilihat dari hubungan petani dan penyuluh di daerah tersebut. Dari 401 desa yang ada di Kota Gorontalo hanya terdapat 233 penyuluh pertanian sehingga masih banyak daerah yang belum terlayani secara optimal.

Curahan waktu penyuluh dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan dan operasional kelembagaan pada model kelembagaan sentralisasi secara umum lebih rendah dibandingkan pada model kelembagaan desentralisasi. Sebaliknya pada aktivitas monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan curahan waktu penyuluh lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, affendi dan hermanto siregar. 1998. *Memahami kelembagaan asuransi pertanian dalam kegiatan agribisnis di wilayah pedesaan, dalam affendi anwar. 1995. agricultural planning volume I.*

Bahan agriculture - short course. Universitas mataram, lombok (januari 1995).

Deptan. 2007. *Revitalisasi Penyuluhan Pertanian. Dalam keluarganya. Dalam http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/index.php?option=com_content&task=view&id=429&Itemid=65. Di akses 1 mei 2015.*

Dewan Ketahanan Pangan dan FAO. 2005. *Kebijakan Umum Ketahanan Pangan. Makalah disampaikan pada Perumusan Program Ketahanan Pangan Nasional, Jakarta 12 September 2005.*

Jahan KM, at.al. 1998. *Transaction Cost in Fisheries co-Management at Oxbow Lake (Baor) in Bangladesh. University Puta, Malaysia.*

Rachman, H.P.S., M. Ariani, dan T.B. Purwantini. 2007. "Distribusi Provinsi di Indonesia menurut derajat ketahanan pangan rumah tangga". *Monograph No. 26. Balitbang Pertanian, Departemen Pertanian. Jakarta.*

Suryana, A. 2001. *Tantangan dan Kebijakan Ketahanan Pangan Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat untuk Mencapai Ketahanan Pangan dan Pemulihan Ekonomi, Departemen Pertanian, Jakarta 29 Maret*

2001.

-----, 2002. Perspektif dan Upaya Pemanjapan Ketahanan Pangan Berkelanjutan. Badan Bimas Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian. Makalah pada Lokakarya Tekanan Penduduk, Degradasi Lingkungan dan Ketahanan Pangan, I Mei 2002. IPB Bogor.

Susilowati, I. dan B. Suprihono. 2004. "Analisis Efisiensi Usahatani Padi pada Lahan Sempit ($< 0,5$ Ha) dengan Irigrasi Tadah Hujan di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak". *Jurnal EKOBIS* Vol.6; No.1 Fakultas Ekonomi UNISSULA. Semarang.

Susilowati, I. et al. 2004. *Pengembangan Model Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi Dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Kabupaten dan Kota Pekalongan*. RUKK Kantor Meneg Ristek dan LIP]. Jakarta.

Susilowati, I. et al. 2005. *Pengembangan Model Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi Dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Kabupaten dan Kota Pekalongan*. RUKK Kantor Meneg Ristek dan LIPI. Jakarta. Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2006

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 pada tanggal 14 Nopember 2007 telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Bakorluh).

Waridin 2007. "Analisis efisiensi penggunaan input dan produktivitas alat tangkap purse seine: Studi kasus di Kota Pekalongan, Jawa Tengah". *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* Edisi Khusus. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Waridin dan Sigit Larsito. 2006. "Alokasi penggunaan faktor produksi dan fungsi keuntungan usahatani tembakau rakyat di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah". *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Volume 7 Nomor 1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Waridin dan Sri Rejeki. 2007. "Keefisienan Usahatani Jahe di Kecamatan Ampe Kabupaten Boyolali". *Jurnal Pembangunan Pertanian dan Pedesaan*, Universitas Jember Soedirman, Purwokerto.